BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Birokrasi di Indonesia saat ini telah berubah dikarenakannya perubahan teknologi dan informasi yang semakin pesat, globalisasi ini menciptakan perubahan sistem dari manual ke sistem *electronic* yang membuat kehidupan sehari-hari dan pekerjaan lebih cepat, efektif dan efisien. Perubahan pengetahauan sistem teknologi dan informasi pada birokrasi menggerakan aparat birokrat dalam menjalankan pemerintahan dengan lebih baik sehingga tercapai suatu tujuan yang diharapkan. Dalam penerapannya aparat birokrat diharapkan dapat menjadi suatu alat untuk dapat menjalankan suatu birokrasi yang ada, dimana didalam suatu pemerintahan terdapat penempatan-penempatan dan sistem pendukung yang telah disusun dengan menyeseuaikan tugas serta fungsinya (Abdussamad, 2021).

Dalam sistem birokrasi atau pemerintahan didalam suatu negara harus terciptanya manajemen pemerintahan, manajemen pemerintahan dalam mengelola organisasi negara sangat penting diberlakukan demi dapat mencari *problem solver* yang berkaitan dengan permasalahan yang di hadapi pemerintahan suatu negara. Manajemen Pemerintah adalah proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintah oleh penguasa atau penyelenggara, dan karyawan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan (Budi Supriyanto, 2009).

Untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Good Governance* harus diberlakukan pada semua tingkat inti Pemerintahan dan pada semua kegiatan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Negara melalui optimalisasi pengembangan dan pemanfaat *electronic government,* dan dokumen atau arsip Negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi Pemerintah (Hetifah Sumarto, 2009)

Governance diartikan menjadi tata kelola pemerintahan yaitu bagaimana para aktor formal maupun informal dalam menggunakan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi yang berguna untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat dan bagian pemrintahan. *Governance* adalah dimana cara bagaimana para pengelola atau individu dari sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor pemerintah dan sektor non pemerintah dalam suatu usaha-usaha yang kolektif (Ganie-Rochman, 2000). Menurut Lembaga Administrasi Negara *good governance* diartikan sebagai dimana penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertanggungjawab dan kuat, efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergian" interaksi yang konstruktif anatara negara, sektor swasta dan maupun sektor mayrakat.

Tujuan dari *good governance* adalah untuk membangun pelaku-pelaku organisasi, khususnya para pemimpin, untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum, mengubah cara kerja organisasi publik, dan membuat pemerintahan *accountable.*

Pengembangan *electronic government* adalah salah satu cara pemerintah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan transparasi dan terciptanya *good governance.* Oleh karenanya pengembangan *electronic government* di Indonesia juga harus memperhatikan penguatan sistem dan jaringan sebagai salah satu instrumen dan sarana yang dibutuhkan dalam terciptanya penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang baik. Pengembangan *electronic government* juga harus dilihat dari para pengelola internal pemerintahan yang menjalankan dan mengaplikasikan sistem-sistem elektronik yang ada pada pemerintahan, para pengelola harus kompeten dan mampu mengoperasikan sistem-sistem *elektronic* yang ada pada pemerintah agar *electronic government* dapat berjalan dengan sesuai (Eko 2016).

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkedudukan dan diyakini diperlukan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dapat diartikan sebagai dimana penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya atau pengguna SPBE itu sendiri. Pada saat ini pemerintahan atau birokrasi di Indonesia telah memasuki era yang belum terbayangkan sebelumnya yaitu era birokrasi digital (Syariffuddin 2020).

Birokrasi digital tercipta karena adanya perubahan teknologi dan informasi dunia yang berubah secara cepat setiap tahunnya, membuat semua individu terbiasa dengan kegiatan sehari-hari berbasis digital, birokrasi di Indonesia tidak boleh terbelenggu dalam rasa nyaman atau *comfort zone,* dalam waktu lama karena jika birokrasi di Indonesia tidak mengikuti perubahan yang ada maka birokrasi di Indonesia akan dilindas perputaran roda Abad-21 dan tidak terciptanya pemerintahaan yang baik atau *good governance* (Laoly, 2019).

Di Indonesia sistem *electronic government* sudah mulai berkembang dan diterapkan diseluruh bagian pemerintahan atau birokrasi, mulai dari sistem perencanaan *internal* lembaga, sistem evaluasi internal lembaga, sistem pengaduan kepada lembaga oleh masyarakat, sistem informasi kepada masyarakat, sistem pesan yang berbasis *electronic.* Dengan adanya *electronic government* pekerjaan yang telah diberikan dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien.

Gambar 1.1 *United Nations (UN) e-Government Survey* 2020

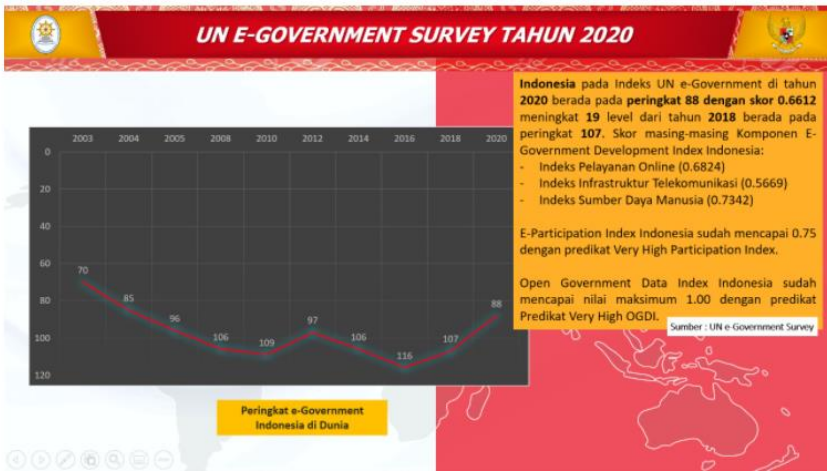

Sumber : *Department of Economic and Social Affairs (publicadministration.un.org)*

Hasil *survey* pada gambar 1.1 adalah hasil yang dikeluarkan oleh *United Nations* (UN) *Electronic government survey* 2020 telah menempatkan Negara Indonesia ke dalam peringkat 88 atas pembangunan, pengembangan serta pengimplementaisan *electronic government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Gambar 1.2 *United Nations (UN) e-Government Survey* 2020

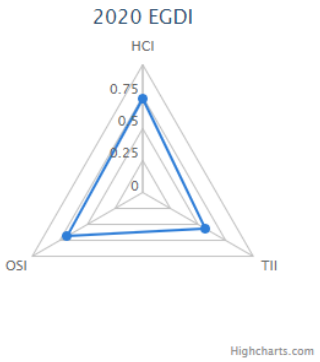

E-Government (2020 EGDI: 0.6612)	
2020 Rank	88
Group	HEGDI
Rating Class	H3
2018 Rank	107
Change	-19

E-Participation (2020 EPART: 0.7500)	
2020 Rank	57
2018 Rank	92
Change	-35

Sumber : *Department of Economic and Social Affairs (publicadministration.un.org)*

Secara keseluruhan dapat dikatakan Indonesia telah mencetak skor 0.6612 di dalam grup *High E-Government Development Index* (EGDI) di UN *Electronic Government Survey* 2020 sehingga Indonesia dapat berhasil masuk 100 besar peringkat dunia di posisi 88 dari 193 negara yang ada. Perserikatan Bangsa-Bangsa mempredikatkan negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai *Very High* EGDI, untuk poin 0.50 sampai 0.75 sebagai *High* EGDI, poin 0.25 sampai 0.50 sebagai *Middle* EGDI, dan kurang dari 0.25 sebagai *Low* EGDI. Indonesia dapat berhasil melompat naik 35 peringkat pada *E-Participation Index* tahun 2020, dari yang sebelumnya peringkat 92 pada tahun 2018, dapat menjadi peringkat 53 pada tahun 2020 dengan mendapatkan skor 0.7500.

Terdapat tiga dimensi dalam ukuran kinerja yang ada dalam *Electronic Government Development Index*, yang di antara nya adalah indeks pelayanan *online* atau *online service index* (OSI), *indekx* infrastuktur telekomunikasi atau *telecommunication infrastructure index* (TII), dan *index* sumber daya manusia atau *human capital index* atau disebut (HCI).

Gambar 1.3 *United Nations (UN) e-Government Survey* 2020

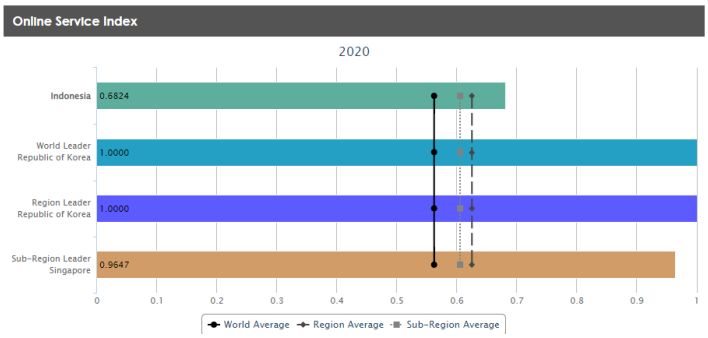

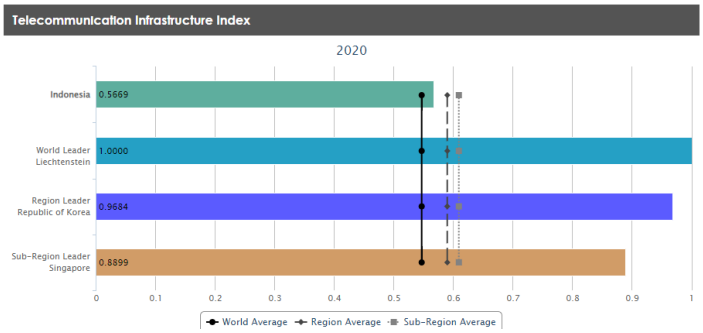

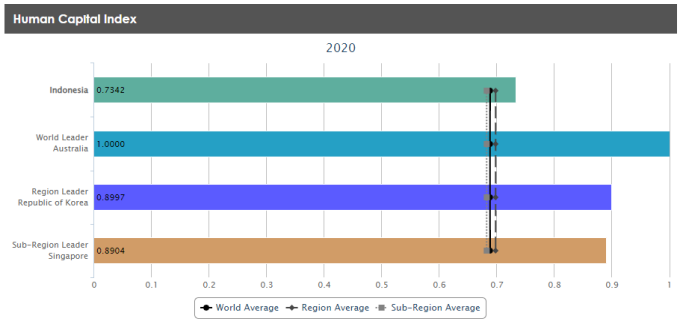

Sumber : *Department of Economic and Social Affair (publicadministration.un.org)*

Dalam masing-masing penilaian ukuran kinerja pada gambar 1.3 bisa dikatakan Indonesia mendapatkan skor yang cukup baik yaitu mendapatkan skor 0.6824 untuk OSI, skor 0.5669 untuk TII, dan skor 0.7342 untuk HCI. Ketiga komponen tersebut sudah dapat dibilang berada di atas skor rata-rata dunia, meskipun jika dilihat dari *group regional* Asia dan *Sub-Regional* Asia Tenggara, Indonesia masih berada di bawah rata-rata *regional* atau rata-rata daerah dalam skor indeks infrastruktur telekomunikasi atau disingkat TII.

Indonesia pada tahun 2020 dapat berhasil mendapat skor 0.7500 skor ini sudah diatas rata rata dunia yang berjumlah skor 0.5677, di atas rata rata Regional Asia Tenggara dengan berjumlah skor 0.6126. Indonesia naik predikat dari yang sebelumnya masuk kedalam grup *High e-Participation Index* menjadi masuk kedalam grup *very high e-participation index.* Indonesia mencetak skor sebesar 0.06612 di dalam grup *High electronic government development index* (EGDI) di UN *electronic government.* Sehingga Indonesia dapat masuk 100 besar peringkat dunia di posisi 88 dari 193 negara.

Dari hasil *survey* dan penjelasan diatas dilihat bahwa Indonesia sudah mengimplementasikan *electronic government* dalam pemerintahannya, untuk mewujudkan dan dapat terciptanya pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat melakukan pelayanan publik dan menciptakan peraturan yang seusai, akurat dan terpercaya diperlukan SPBE yang sesuai.

Pemerintah dan birokrasi di Indonesia harus dapat bisa mengembangkan dan mengimplementasikan secara berkala agar *electronic government* ini agar dapat bisa membantu terwujudnya pemerintahan yang baik atau *good governance*, mengembangkan *good governance* dalam organisasi sektor publik adalah proyek sosial, psikologi, dan perilaku yang besar, terkait dengan para pengambil keputusan organisasi. Membangun *good governance* adalah membangun perilaku-perilaku organisasi dan pimpinan organiasi yang secara bersamaan membangun dan ikut berperan dalam membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum, mengubah cara kerja organisasi, dan membuat pemerintahan menjadi *accountable*.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik harus diberlakukan di setiap instansi atau lembaga yang menjalani kegiatan birokrasi, dalam skripsi ini, penulis mencoba meneliti salah satu sistem pemerintahan berbasis elektronik di dalam *internal* lembaga, karena di dalam suatu lembaga harus diberlakukan sistem elektronik yang sifatnya *internal* yang dapat membantu para birokrat atau pemegang kekuasaan dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. Menurut penulis, sistem *internal* yang ada di lembaga-lembaga negara adalah salah satu cara dalam mewujudkan terciptanya kinerja yang baik dan kinerja yang diharapkan, jika sistem *internal* di dalam lembaga-lembaga atau organisasi sudah tersusun dengan baik dan lancar maka kinerja serta kebijakan-kebijakan yang diciptakan akan tersusun dan terpantau dengan baik dan benar.

Penulis mengambil salah satu contoh penerapan pemerintahan berbasis elektronik di Lembaga Negara di Indonesia yang menerapkan aktivitas kerja secara *electronic* di *internal* lembaganya, yaitu Lembaga Negara yang mengimplementasikan sistem *electronic government* atau informasi elektronik yaitu pada Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2013 dinyatakan bahwa Lembaga Administrasi Negara adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberikan kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur negeri sipil yang diatur dalam undang-undang. Lembaga Administrasi Negara mendapatkan kewajiban melaksanakan kewajiban dalam negara atau pemerintahan dalam ilmu Administrasi Negara yang keberadannya tepat dibawah serta mempunyai tanggung jawab terhadap Presiden dan prosesnya atau perantaranya melalui Menteri. Lembaga Administrasi Negara dipimpin oleh Kepala yang ada di LAN mempunyai kewajiban memimpin dan menjadi pimpinan pada Lembaga Administrasi Negara ketika merealisasikan kewajiban di LAN.

Lembaga Administrasi Negara memiliki tugas meneliti, mengkaji, dan melaksanakan inovasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kebutuhan kebijakan LAN memiliki fungsi melakukan pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara. Lembaga Administrasi Negara juga mempunyai wewenang memberikan rekomendasi dalam bidang kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara kepada Menteri.

Dalam rangka memperkuat manajemen kinerja LAN, sejak tahun 2015 telah dibangun Program Sistem Informasi Perencanaan Dan Evaluasi (SIREVA). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dalam pertukaran informasi, pengetahuan dan mengakselerasi proses penyampaian data dan informasi di bidang perencanaan kinerja dan anggaran, sireva LAN adalah sistem *internal* yang berisi tentang perencanaan program kerja di dalam *internal* LAN, sistem informasi ini dapat digunakan oleh seluruh anggota organisasi internal yang ada di LAN dan sistem informasi perencanaan dan evaluasi program ini dikelola di bagian Biro Perencanaan, dimana ada beberapa pengelola yang mengelola sistem tersebut.

Dalam penelitian ini penulis memilih LAN sebagai lokasi penelitian dikarenakan penulis ingin menghasilkan penelitian yang sesuai dengan apa yang penulis dapatkan dari perkuliahan yaitu sistem informasi manajemen dalam lembaga pemerintahan, apakah sistem informasi dalam lembaga pemerintah sudah diterapkan dan dikelola dengan baik atau belum dan apakah sistem informasi dalam lembaga ini mampu mewujudkan *good governance*.

Dimana alasan penulis memilih topik ini adalah karena, jika di suatu organisasi terdapat informasi perencanaan program dan evaluasi program maka internal organisasi tersebut akan terstruktur programnya, memudahkan semua anggota organisasi dalam menjalankan program yang telah ditentukan dan akan lebih mudah dalam mencapai tujuan organisasi. Dan penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Negara yaitu Lembaga Administrasi Negara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Dan Evaluasi Program di Lembaga Administrasi Negara?
2. Bagaimana Sistem Informasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Mampu Mewujudkan *Good Governance?*

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Bagaimana Implementasi Sistem Informasi di Lembaga Administrasi Negara
2. Menganalisis Sejauh mana Sistem Informasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Mampu Mewujudkan *Good Governance*

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Akademik

Berbagai peneltian terdahulu yang telah dilakukan dan membahas mengenai implementasi *electronic government* dan penelitian yang membahas tentang sistem informasi *internal* yang ada di Lembaga Negara atau di suatu organisasi yang telah banyak dilakukan sebelumnya. Jumlah *literatur review* penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi atau rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan atau dalam penelitian ini adalah 12 jurnal, diantaranya adalah :

Rujukan Pertama yang peneliti ambil adalah, Skripsi yang berjudul "Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *Electronic Planning* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan" oleh Lestari Situmorang. Hasil Penelitiannya adalah SPBE yang diterapkan menunjukan penerapan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *Electronic Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sudah memiliki komunikasi yang baik. Walaupun masih terdapat masalah seperti jaringan internet yang belum stabil dan sumber daya manusia yang kurang karena pergantian operator sistem *e-planning* dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Relevansi Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah memberikan kaitan langsung dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bagaimana suatu lembaga mengimplementasikan perencanaan disuatu lembaga yaitu dengan melalui *electronic planning.*

Rujukan kedua, Jurnal yang membahas "Dampak Budaya Kerja Dalam Penerapan *E-Planning* Untuk Mewujudkan *Good Governance"* penulis Tomi Satria dan Aldri Frinaldi yang di terbitkan 2021. Hasil penelitan menyatakan bahwa dampak budaya kerja dalam penerapan *e-planning* untuk mencapai *Good Governance* di Bapelitbang Kabupaten 50 Kota sudah memberikan dampak yang baik. Relevansi Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang *electronic planning* yang berdampak pada budaya kerja dimana sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yang juga membahas *electronic planning.*

Rujukan Ketiga, Jurnal Egis Tektona Grandis pada tahun 2019 yang berjudul "Efektivitas Penerapan Sistem *E-Planning* Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Dan pembangunan Daerah Kota Banjar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas sistem *e-planning* program pembangunan daerah di BAPPEDA Kota Banjar menunjukkan bahwa sebagian besar ketercapaian pengusulan program kegiatan dilakukan dengan baik, Keefektifitasan tersebut tampak bahwa keuntungan usulan sistem *e-planning* terkunci dan terdokumentasikan berupa *softcopy*, mobilitas pegawai yang hemat waktu dalam meng-input data sehingga adanya pengurangan biaya. Relevansi penelitian ini dengan tentang efektivitas penerapan *e-planning* yang sejalan dengan rumusan masalah saya yang membahas tentang efektivitas tentang Sireva yang didalamnya terdapat *e-planning*.

Rujukan Keempat, Jurnal Muhammad Habibi yang berjudul "Evaluasi Implementasi Sistem *E-Planning* di Kabupaten Kutai Timur Menggunakan Pendekatan Metode PEGI" pada tahun 2018. Hasil penelitiannya adalah Hasil evaluasi Implementasi sistem *e-planning* di Bappeda Kutai Timur yang diukur dengan Metode PeGI, Bappeda Kutai Timur secara keseluruhan berada pada nilai 2,5 Secara umum implementasi sistem *e-planning* di Bappeda Kutai Timur dikategorikan baik. Dalam jurnal ini terdapat pembahasan tentang sistem informasi dimana pembahasannya dapat menjadi salah satu relevansi penulis.

Rujukan Kelima, Tesis yang membahas "Evaluasi Penerapan *Sepp* (Sistem *E*-Pengadaan Pemerintah) Menurut Perspektif *Good Governance* Di Departemen Komunikasi Dan Informatika" pada tahun 2010 oleh Eviana D. Sofyaningrum. Hasil dalam tesis ini adalah hasil evaluasi penerapan SePP pada umumnya adalah sangat baik, yaitu efisien dari segi biaya dan waktu, akuntabel, responsif, transparan dan partisipatif. Jika dilihat dari masing-masing dimensi *Good Governance*, pada umumnya responden menilai evaluasi penerapan SePP memberikan skor yang paling tinggi pada dimensi responsibilitas, dan responden cenderung memberikan nilai yang kurang baik pada dimensi akuntabilitas. Relevansi dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah dimana sistem informasi dilihat dari masing- masing dimensi *Good Governance.*

Rujukan Keenam, Jurnal yang berjudul "Implementasi *Electronic Government* Dalam Mewujudkan *Good Governance* dan *Smart City* (Studi Kasus: Pemerintah Kota Makassar)" oleh Nasrullah pada tahun 2017. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah penerapan *e-government* di kota Makassar menghadapi beberapa tantangan khususnya yang dihadapi oleh organisasi yaitu masalah sumber daya manusia yang belum memadai. Relevansi jurnal ini adalah pembahasan yang dibahas mempunyai kesamaan yaitu membahas bagaimana suatu sistem elektronik yang dapat mewujudkan dan terciptanya *Good Governance*.

Rujukan Ketujuh, Jurnal Mohamad Sukarno pada tahun 2020 yang berjudul "Implementasi Kebijakan *E-Planning* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo". Dari Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan *e-planning* pada BAPPEDA Kulon Progo sudah sesuai dengan arahan PP No. 8 tahun 2008 tetapi terdapat ditemukan sedikit kendala dan kekurangan dari pengaplikasiannya contohnya seperti pengembangan jaringan informasi, proses penginputan data, dan kesiapan atau kemapanan dari sebuah sistem atau perangkat**.** Relevansi dalam penelitian ini dengan penelitian akan dilakukan mempunyai pembahasan yang sama yaitu dimana membahas tentang implementasi *electronic government* yaitu *e- planning*.

Rujukan Kedelapan, Skripsi Dian Pertiwi yang berjudul "Implementasi Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan" Dispenda provinsi sulawesi selatan sudah menerapkan kelima unsur Sistem Pengendlian Intern Pemerintah dengan baik dan berkomitmen untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam skripsi ini membahas tentang pengendalian *internal* pemerintahan dimana pengendalian *internal* pemerintahan adalah relevansi dalam peneltian yang dilakukan yaitu dimana pengendalian didalam lembaga atau organisasi yang mampu mewujudkan organisasi yang baik.

Rujukan Kesembilan, Jurnal “Penerapan *E-Planning* sebagai bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Demak” oleh Devita Maharani dan Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si. hasil penelitiannya adalah *E-Planning* yang dijalankan masih di dalam tahap *web presence* karena ketika dilihat dalam penerapannya website *E-Planning* tidak memberikan ruang yang interaktif bagi masyarakat. Peneltian ini merujuk teori *Good Governance*, *E-Government* yang dimana sama dengan pembahasan penulis, adanya keterkaitan dalam teori yang membuat jurnal ini menjadi salah satu relevansi peneliti.

Rujukan kesepuluh dalam penelitian ini adalah Jurnal oleh Toni Heryana dan Sari Kartika Dewi yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-Government* Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur” Implementasi *e-government* pada sebagian besar Dinas, Instansi dan Perkantoran di Kabupaten Cianjur berpengaruh sebesar 78,5% terhadap implementasi tata kelola Dinas. Sedangkan sisanya 21,5% merupakan pengaruh faktor lain di luar *e-government*. Relevansi penelitian penelitian ini adalah sama-sama membahas *e-government* pada lembaga negara.

Rujukan kesebelas adalah Jurnal oleh Imronah yang berjudul “Implemtasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya”. Penulis jurnal ini adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Fatah Demak. Relevansi jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah memberikan gagasan kepada peneliti untuk mampu mengadopsi teori-teori Impelementasi Kebijakan.

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti adalah lebih banyak yang membahas tentang implementasi pengendalian internal organisasi atau lembaga nya saja yaitu (Lestari,2021, Muhammad,2018, Nasrullah,2017, Mohamad,2020, Dian,2016, Devita,2020, Didik,2013). Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang efektivitas dan pengaruh sistem informasi dalam organisasi atau lembaga yaitu (Egis,2019, Toni,2013, Dian,2021).

Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dimana penelitian ini lebih fokus membahas tentang implementasi, dan peran sistem informasi perencanaan dan evaluasi program dalam mewujudkan *good governance* di dalam *internal* organisasi.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan kontribusi dan referensi penelitian atau pembelajaran dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya studi tentang Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Evaluasi Program di Lembaga Administrasi Negara dalam Mewujudkan *Good Governance.* Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi pembaca dan dapat menjadi salah satu refrensi penelitian yang akan dilakukan kedepannya nanti.

Seacara umum diharapkan Penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dalam penerapan sistem informasi dan evaluasi program dalam mewujudkan terciptanya *good governance* dalam sistem ini. Diharapkan sistem ini mampu di implementasikan dengan secara baik dan benar.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharpkan dan dapat digunakan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk memberikan rekomendasi pemikiran-pemikiran serta aspek-aspek yang perlu ditambahkan serta diperhatikan dalam implementasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi program di lembaga admnistrasi negara. Penelitian ini diharpkan memberikan masukan kepada Lembaga Administrasi Negara dalam mengimplementasikan sistem informasi perencanaan dan evaluasi program sebagai suatu sistem dalam memperlancar informasi *internal* LAN dalam melakukan pertukaran informasi rencana kerja dan evaluasi kerja yang sesuai dengan penerpan prinsip-prinsip *good governance*.

Hasil penelitian ini diharapkan dan dapat diguanakan oleh mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik unutk memberikan rekomendasi pemikiran-pemikiran serta refrensi kepada mahasiswa atau mahasiswa dalam terhadap pembahasan mengenai sistem informasi dan prinsip *good governance*.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul ”Implmentasi Sistem Informasi Perencanaan Dan Evaluasi Program (SIREVA) Di Lembaga Administrasi Negara Dalam Mewujudkan *Good Governance* ” terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan latar belakang Birokrasi di Indonesia dan pengertian dari birokrasi yang menyatakan birokrasi adalah dimana didalam sebuah pemerintahan terdapat penempatan-penempatan dan sistem pendukung dimana aparat birokrat dapat diharapkan menjadi suatu alat untuk dapat menjalankan birokrasi yang ada.

Bab I ini juga membahas atau terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan siginifkasi penelitian yang terdiri dari : signifikasi akademik, signifikasi praktis.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bagian ini berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian, yang berisi teori yang digunakan, kerangka pemikiran, asumsi penelitian. Sebagai upaya dalam menjawab permasalahan yang ada maka, pada bab ini terdiri dari beberapa teori-teori pendukung yaitu teori, Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, teori pemerintahan berbasis elektronik menurut peraturan Presiden nomor 95 tahun 2013 dan teori *good governance United Nations* 2000.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini berisi tentang, Paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik peroloehan data, teknik analisis data, *goodness* dan *quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, keterbatasan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif yaitu Bryman dan Bell (2007). Dan dalam penelitian ini peneliti memakai desain Studi Kasus.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang, gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, pembahasan yang diteliti oleh peneliti dengan menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian membedakan dan menyamakan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu dan menjelaskan pentingnya penelitian yang telah diteliti.

BAB V KESIMPULAN

Pada bagian ini berisi tentang, kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menarik inti dari hasil penelitian tersebut, dan terdapat sub bab rekomendasi penelitian yang membahas tentang saran ataupun rekomendasi dari peneliti untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dan saran untuk tempat dari objek penelitian.